

IMPLEMENTASI PELAPORAN DIGITAL KAMPUNG KB PADA KAMPUNG KB GAYUB KOTA SURABAYA

Ananda Eka Putri Trisnawati^{1)*}, Binti Azizatun Nafi'ah²⁾

(e-mail: 21041010133@student.upnjatim.ac.id^{1*)})

(*) Corresponding Author

^{1), 2)} Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN "Veteran" Jawa Timur

ABSTRACT

This research aims to find out how the KB Village Website is implemented, in KB Gayub Village, Gunung Anyar Village, Gunung Anyar District, Surabaya City. The method used is a qualitative descriptive approach. The data sources obtained are primary and secondary data types, where data collection techniques are carried out through observation, interviews, and literature studies from several articles, journals, and news that are relevant to the discussion in this research. The research uses Sujianto's theory of policy implementation which was chosen as analysis material to see the findings in the field. The results of the research show that the implementation of Digital Reporting for KB Village via the Gayub KB Village Website in Gunung Anyar Village, Gunung Anyar District, Surabaya City is not yet optimal, based on a theoretical study of policy implementation by Sujianto which consists of four indicators, namely communication, resources, disposition and policy benefits. Of these four indicators, what is still an obstacle is the lack of communication and the lack of competence possessed by human resources in the ability to input and report activities on the KB Gayub Village Website, Gunung Anyar District.

Keywords: Implementation; Reporting; Digital; Village

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Website Kampung KB, pada Kampung KB Gayub Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya. Metode yang digunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Adapun sumber data yang didapatkan adalah jenis data primer dan sekunder, yang mana teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi literatur dari beberapa artikel, jurnal, maupun berita yang memiliki relevansi dengan pembahasan pada penelitian ini. Penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan Sujianto yang dipilih sebagai bahan analisis untuk melihat hasil temuan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Pelaporan Digital Kampung KB melalui Website Kampung KB Gayub pada Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya belum optimal, berdasarkan dengan kajian teori implementasi kebijakan oleh Sujianto yang terdiri atas empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan manfaat kebijakan. Dari keempat indikator tersebut, yang masih menjadi kendala adalah kurangnya komunikasi serta masih kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh SDM dalam kemampuan penginputan dan pelaporan kegiatan pada Website Kampung KB Gayub Kelurahan Gunung Anyar

Kata Kunci: Implementasi; Pelaporan; Digital; Kampung

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai Landasan Penyelenggaraan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana, ditegaskan bahwa kompetensi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan

hal-hal tertentu saja. Yaitu tidak hanya terkait dengan keluarga berencana dan pembangunan keluarga bahagia, namun juga menyangkut persoalan pengendalian jumlah penduduk. Terkait dengan arah kebijakan pembangunan nasional, Presiden Republik Indonesia yaitu Presiden Joko Widodo memberikan wewenang kepada BKKBN untuk

mengembangkan kegiatan atau program guna meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan atau sasaran pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2015-2019. Kegiatan ini menjadi ciri khas BKKBN dalam memberikan kontak langsung dan manfaat bagi masyarakat Indonesia di seluruh wilayah (Fitria, 2020)

Hal ini didukung dengan adanya pemerintah yang berusaha untuk fokus pada program KB dengan menerapkan inovasi baru yaitu penetapan kampung KB sebagai agenda prioritas pengembangan Navahita, termasuk tiga agenda yang digagas Presiden Joko Widodo. Sebagai bentuk penyesuaian kebijakan pemerintah, Kampung KB tidak lagi hanya fokus pada menekan laju pertumbuhan penduduk, namun lebih memberikan perhatian pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga perlu mendapat perhatian karena keluarga mempunyai peran dan nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan dan berkualitas. Karena dimulai dari keluarga maka akan terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas.

Program Kampung Keluarga Berkualitas sendiri pertama kali diluncurkan oleh Presiden RI pada tanggal 14 Januari 2016 di Dusun Jenawi, Desa Mertasinga, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Semula bernama Desa Keluarga Berencana, namun pada awal pelaksanaan Desa Keluarga Berencana kurang ideal, padahal sudah banyak program dan kegiatan tingkat desa yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga yang dapat diintegrasikan dengan program Desa Keluarga Berencana. Hal ini disebabkan karena belum adanya kebijakan dan prosedur partisipasi lintas departemen dalam proyek desa KB yang terdokumentasi, sehingga pada tahun 2020, tepatnya pada tanggal 15 April 2020, telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Kementerian Sipil Nomor 29. 843.4/2879/SJ, Kampung Keluarga Berencana resmi berganti nama menjadi Kampung Keluarga Berkualitas.

Hal ini kemudian didukung pula dengan keluarnya Inpres No. 3 Tahun 2022 yang berisikan intruksi sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing, merumuskan kebijakan peningkatan kualitas keluarga, melakukan koordinasi secara menyeluruh, melakukan upaya-upaya, dan melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan terselenggaranya desa keluarga yang berkualitas. Dengan adanya Inpres Nomor 3 Tahun 2022 mengusulkan agar pengembangan kegiatan desa keluarga yang berkualitas dapat lebih optimal dan menjadi aksi bersama desa untuk mengkoordinasikan dan mendorong pemberdayaan kelembagaan keluarga, serta derajat untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat.

Dengan adanya pelaksanaan program Kampung KB ini juga dibarengi oleh terciptanya *website* Kampung KB sebagai pelaporan berbentuk digital yang digunakan sebagai wadah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas, mengenai perkembangan dari suatu Kampung KB di setiap wilayah. Berdasarkan laman resmi Kampung KB, Kampung KB merupakan satuan wilayah tingkat desa dengan standar tertentu yang mengintegrasikan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan pembinaan dinas terkait dalam upaya meningkatkan kualitas penduduk. . Kehidupan keluarga dan komunitas. Yang Saat ini, kampung keluarga berkualitas di Jawa Timur telah terbentuk di 1.850 desa/kelurahan di Indonesia (mencakup sekitar 21% desa/kelurahan di Indonesia). Berdasarkan data yang dapat dilihat dari *website* resmi Kampung KB yaitu <https://kampunqkb.bkkbn.go.id/>, dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang ikut serta dalam pelaksanaan Kampung KB, Surabaya adalah satu dari banyaknya kota di Jawa Timur yang melaksanakan program Kampung KB. Inisiasi keikutsertaan

pelaksanaan kampung keluarga berkualitas (KB) merupakan upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan kampung yang memiliki penduduk dengan keluarga berkualitas. Dalam mewujudkan Kota Surabaya yang berkualitas, maka masyarakat di Kota Surabaya harus memiliki perspektif yang sama terkait pentingnya pengembangan kampung yang mampu mengintegrasikan dan mengkonvergensi institusi keluarga, yang mana segala bentuk kegiatan Kampung KB tersebut dapat dilaporkan dan ditampung dalam *website* resmi Kampung KB yaitu pada halaman kampungkb.bkkbn.go.id

Salah satu wilayah yang memiliki *website* resmi Kampung KB sebagai pelaporan berbentuk digital di Kota Surabaya adalah Kelurahan Gunung Anyar. Program Kampung KB di Kelurahan Gunung Anyar sendiri dibentuk pada bulan Juli 2023, yang diberi nama Kampung KB Gayub. Meskipun dapat dikatakan bahwa Kampung KB Gayub merupakan Kampung KB yang baru, namun setelah penulis teliti ternyata sejauh ini Kampung KB Gayub sudah sejalan dengan misi Program Kampung KB itu sendiri yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berbagai program/kegiatan yang digagas BKKBN sudah dilaksanakan. Bahkan Kampung KB Gayub juga sudah memiliki kelompok kegiatan seperti BKL (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), (BKL) Bina Keluarga Lansia, dan PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja yang diintegrasikan dengan beberapa kegiatan maupun kelompok di Kelurahan Gunung Anyar. Berdasarkan hasil observasi penemuan, bahwa penerapan Implementasi kebijakan Kampung KB di Kelurahan Gunung Anyar secara keseluruhan sudah relatif baik, namun kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan kegiatan Kampung KB, tidak dilaporkan pada *website* Kampung KB Gayub milik kelurahan Gunung Anyar. Sehingga, klasifikasi pada *website* Kampung KB Gayub masih pada kategori dasar dengan warna merah. Hal ini dapat terjadi akibat kurangnya

komunikasi serta kemampuan sumber daya manusia yang ada, guna untuk menginput/melaporkan data dan kegiatan pada *website* Kampung KB. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seperti apa Implementasi Pelaporan Digital Kampung KB, melalui *website* pada Kampung KB Gayub Kota Surabaya.

Implementasi Kebijakan Publik. Salah satu langkah dalam proses kebijakan publik adalah implementasi kebijakan publik. Tujuan yang telah ditetapkan harus dicapai melalui penerapan program kebijakan. Menurut (Tachjan, 2006) implementasi kebijakan publik sangat penting. Kebijakan publik hanya akan menjadi "macan kertas" jika tidak diterapkan. Oleh karena itu, agar kebijakan publik dapat berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan keputusan atau kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, implementasi kebijakan publik harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang ada. Kegiatan yang berisi mempraktekkan, melaksanakan, melakukan, atau mengerjakan suatu kegiatan disebut implementasi. Kegiatan yang termasuk dalam kategori kegiatan publik karena kegiatan yang terkait dengan kegiatan pemerintah. Kebijakan pemerintahan, seperti keputusan dan peraturan yang dibuat oleh gubernur, bupati, atau wali kota, juga dapat disebut sebagai kebijakan publik. Hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan dari Mazmanian dan Sabatier dalam (Wahab, 2011): "Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif legislatif yang penting atau keputusan badan peradilan". Teori implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh George C. Edwards III dalam (Leo, 2006) ini dikenal dengan "*Direct and Indirect Impact on Implementation*". Teori tersebut dituangkan dalam karya tulisnya yang berjudul "*Implementing Public Policy*". Dalam pendekatan yang disampaikan oleh

Edwards III, terdapat empat faktor (*variable bebas*) yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik, yaitu ada komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. (Sujianto, 2008) juga memiliki pendapat yang sama dengan George C. Edward, mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, kecuali Sujianto mengganti satu variabel yakni variabel struktur birokrasi dengan jenis manfaat yang diperoleh. Variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut (Sujianto, 2008) yakni:

(a) **Komunikasi**, mencakup tidak hanya hubungan antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan, tetapi yang paling penting adalah hubungan antara pelaksana program dan kelompok sasaran program yang dilaksanakan; kedua jenis komunikasi dilakukan melalui komunikasi vertikal dan horizontal, (b) **Sumber daya**, termasuk sumber daya pelaksana, sumber daya manusia, dukungan fasilitas, dan sumber daya wewenang, (c) **Disposisi**, yaitu apakah mereka ingin menerima atau menolak suatu program, atau mendorong mereka untuk melakukannya, (d) **Manfaat kebijakan**, program yang dirasakan oleh kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan atau tidak, dalam jangka waktu yang pendek maupun berkesinambungan, sehingga akan mendapatkan dukungan yang signifikan dari kelompok sasaran.

Untuk mengkaji implementasi kebijakan publik dengan lebih baik, penulis perlu mengetahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya lebih dulu. Oleh karena itu, untuk menyederhanakan pemahaman konsep implementasi kebijakan, penulis menggunakan model implementasi dari (Sujianto, 2008).

Pelaporan Digital. Laporan anggaran yang merinci berbagai prestasi anggaran berdasarkan alasan dan organisasi yang bertanggung jawab atas anggaran disebut sistem pelaporan. (Anthony, 2000). Sistem pelaporan menunjukkan sistem

pertanggungjawaban dari bawahan ke atasan. Sistem pelaporan yang baik diperlukan untuk memantau dan mengawasi kinerja manajemen dalam memenuhi anggaran (Abdullah, 2005). Untuk memantau dan mengawasi kinerja manajer dalam memenuhi anggaran, diperlukan sistem pelaporan yang baik. Informasi keuangan dan lainnya yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik adalah tanggung jawab pemerintah (Kusmaningrum, 2010).

Sedangkan pengertian digital menurut John W. Lederer adalah "suatu sistem yang menggunakan representasi numerik sebagai cara menyimpan, memanipulasi, dan mengomunikasikan informasi." Dalam konteks ini, digital menggambarkan sebuah sistem yang menggunakan angka-angka sebagai basisnya.

Berdasarkan penjelasan di atas secara keseluruhan, maka pelaporan digital dapat diartikan sebagai sebuah laporan dalam bentuk teknologi atau dalam bentuk *online* dengan tujuan menyampaikan informasi yang digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam kegiatan yang telah dilakukan. Pelaporan digital perlu dilakukan agar pembuat kebijakan dapat memantau para pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

II. METODE

Penggunaan metode dalam penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Adapun sumber data yang didapatkan adalah jenis data primer dan sekunder, yang mana teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi literatur dari beberapa artikel, jurnal, maupun berita yang memiliki relevansi dengan pembahasan pada penelitian ini. Penentuan informan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan yang dipilih adalah para kader kampung KB sebanyak 5 orang.

tempat melakukan pelaporan dan penginputan data mengenai Kampung KB bagi masing-masing wilayah yang akan mempermudah bagi sektor pemerintahan untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi melalui suatu *website*. Selain itu, *website* Kampung KB juga dapat digunakan sebagai wadah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas dari berbagai daerah di Indonesia, mengenai perkembangan dari suatu Kampung KB di setiap wilayah tertentu. Sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat umum pula, untuk dapat melihat dan menikmati informasi mengenai Kampung KB yang ada di daerah lain.



Gambar 2. Tampilan Website Kampung KB Bagi User (login)

Apabila memasuki *website* Kampung KB sebagai *user*, maka akan dapat melakukan penginputan dan pelaporan data dengan cara edit kampung kb. Dalam sudut pandang *user*, fitur yang dapat dilihat adalah Informasi Kampung KB, Laporan Perkembangan, dan Intervensi. Hal tersebut dapat dilakukan pengisian/edit, hanya apabila pengguna memiliki *username* dan *password* dari akun Kampung KB tersebut.



Gambar 3. Tampilan Website Kampung KB Bagi Pembaca

Apabila memasuki *website* Kampung KB sebagai pembaca, maka tidak akan dapat

melakukan pengeditan karena tidak memilih fitur *login*. Dalam sudut pandang pembaca, fitur yang dapat dilihat adalah Jelajahi (digunakan untuk mencari wilayah kampung kb yang akan dicari/dituju); Percontohan (digunakan untuk mencari wilayah kampung KB yang memiliki predikat sebagai percontohan bagi kampung KB yang lain); Statistik (digunakan untuk melihat data statistik secara lengkap mengenai kampung KB di seluruh wilayah); Tentang Kampung KB (seperti namanya, digunakan untuk mengetahui informasi/gambaran mengenai kampung KB); dan masih banyak lagi fitur yang dapat diakses di bagian bawah.

Potensi yang dihasilkan melalui *website* Kampung KB adalah bentuk inovasi guna untuk kemudahan dan kecepatan dalam proses KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) dalam bentuk digital, oleh karena itu pelayanan informasi yang bersifat cepat dan efisien akan dapat dirasakan dan didapatkan oleh masyarakat luas. Dengan adanya *website* ini masyarakat luas dapat mengakses dan melihat perkembangan dan informasi mengenai Kampung KB di Indonesia. Sehingga Kampung KB yang masih dalam proses pengembangan, akan dapat melihat Kampung KB percontohan yang dapat dijadikan sebagai *role model* bagi Kampung KB tersebut. Berikut ini merupakan uraian hasil yang ditemukan oleh peneliti di tempat penelitian tentang bagaimana Implementasi Pelaporan Digital Kampung KB melalui *website* Kampung KB Gayub Kelurahan Gunung Anyar berdasarkan teori implementasi kebijakan oleh Sujianto. Berikut merupakan hasil temuan dan analisis berdasarkan teori tersebut:

Komunikasi. Apabila kebijakan yang dilaksanakan tidak selaras dengan maksud, tujuan, dan sasaran yang telah dibuat, maka akan menimbulkan perubahan makna dari implementasi.. oleh karena itu, komunikasi menjadi faktor yang paling penting dalam proses pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil temuan, dalam Implementasi Pelaporan

Digital Kampung KB melalui *website* Kampung KB Gayub Kelurahan Gunung Anyar yaitu *variable* komunikasi yang dilakukan oleh DP3APPKB Kota Surabaya telah dilaksanakan melalui kolaborasi yang dilaksanakan dengan BKKBN untuk melaksanakan kegiatan Kampung KB dan pelaksanaan *website* Kampung KB.

Berdasarkan *website* resmi dari DP3APPKB, yang berjudul “Wujudkan Keluarga Berkualitas DP3APPKB Gandeng BKKBN Tingkatkan Kapasitas Petugas di Lapangan”, sudah dilaksanakannya Peningkatan kapasitas petugas lini lapangan guna dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan menambah petugas lini lapangan untuk melaksanakan adanya kegiatan/program bangga kencana. Program Bangga Kencana sendiri inovasi yang bersifat unggul oleh BKKBN yang saat ini dimasukkan ke dalam program Kampung KB (Surabaya, 2023). Oleh karena itu, pada *website* Kampung KB dapat ditemui bagian perkembangan bangga kencana untuk masing-masing wilayah. Sehingga dapat dikatakan bahwa kampung kb menjadi rumah bagi adanya kegiatan bangga kencana.

Setelah penyampaian yang dilakukan oleh DP3APPKB bersama BKKBN, para tenaga lini yang ada melakukan penanaman dan pemahaman terhadap warga sekitar mengenai program dan pengoperasian *website* Kampung KB. Akan tetapi, saat adanya sosialisasi tidak semua masyarakat kelurahan Gunung Anyar ikut dalam pembekalan materi, yang menyebabkan banyaknya warga sekitar menjadi tidak tahu mengenai program dan *website* Kampung KB. Selain itu, berdasarkan pernyataan salah seorang kader mengatakan bahwa, sosialisasi hanya dilaksanakan satu kali saja, sehingga penyampaian informasi mengenai *website* Kampung KB dirasa kurang jelas dan optimal. Oleh karena itu saat peneliti bertanya dan melihat secara langsung di lokus penelitian, masih banyak kader yang belum paham bahwa kegiatan yang selama ini sudah dilakukan di kelurahan Gunung Anyar

sebenarnya sudah termasuk dan dapat dikategorikan sebagai kegiatan program Kampung KB. Sehingga para kader juga sama sekali tidak menginput dan melaporkan data serta dokumentasi, yang telah tersedia pada *website* Kampung KB Gayub Kelurahan Gunung Anyar.

Sumber Daya. Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya merupakan faktor penting yang menjadi keberhasilan sebuah implementasi kebijakan, apabila tidak adanya sumber daya yang memadai dan bersifat minimum maka dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Sumber daya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu finansial serta kepemilikan kompetensi dalam manusia. Meskipun suatu program telah dibuat dengan baik, namun jika sumber daya yang diperlukan terbatas dan tidak mumpuni, maka pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut akan mengalami gangguan bahkan dapat menyebabkan kegagalan. Begitu juga dengan Implementasi Pelaporan Digital Kampung KB melalui *website* Kampung KB Gayub kelurahan Gunung Anyar yang juga membutuhkan sumber daya yang baik dan tercukupi. Dalam pengerjaan *website* Kampung KB Gayub kelurahan gunung anyar sumber daya finansial yang dibutuhkan adalah adanya laptop, komputer, atau sejenisnya yang digunakan kader untuk dapat menginput maupun melaporkan kegiatan Kampung pada *website* Kampung KB. Tidak lupa juga adanya fasilitas internet (*wifi*) yang digunakan untuk menyambungkan pada jaringan internet untuk masuk ke dalam *website* Kampung KB.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, bahwa sebenarnya sumber daya finansial tersebut sudah tersedia di kelurahan Gunung Anyar. Bahkan di kelurahan Gunung Anyar juga disediakan sebuah ruangan yang dapat digunakan untuk melakukan proses *input* dan pelaporan data oleh kader. Bahkan di ruang Penyuluh Keluarga Berkualitas (PKB) pun juga sudah disediakan komputer dan jaringan internet yang tersedia, yang dapat digunakan oleh kader dengan pendampingan dari PKB.

Sedangkan dari segi sumber daya manusia dalam pengelolaan *website* dapat dikatakan masih kurang, hal tersebut disebabkan karena ketidakpahaman dari sumber daya manusia dalam penggunaan *website* Kampung KB. Hal ini berkaitan dengan variabel pertama yaitu komunikasi, bahwa karena kurangnya komunikasi yang terjadi antara lembaga terkait dengan implementor di lapangan, membuat implementor di lapangan (kader) belum paham betul mengenai pengisian dan pelaporan dalam *website* Kampung KB. Dari sinilah, peneliti yang melaksanakan kegiatan magang pada posisi Pendamping KB bertugas untuk melakukan penginputan data dan dokumentasi mengenai kegiatan Kampung KB yang sebenarnya sudah dilakukan. Selain itu, peneliti juga membantu kader, agar kader dapat melakukan penginputan dan pelaporan mandiri. Para kader tidak langsung lancar dalam melakukan penginputan data pada *website*, karena hal tersebut juga membutuhkan waktu agar kader dapat terbiasa dalam melakukan penginputan nantinya.

Disposisi. Sikap pelaksana merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Hal ini berkaitan dengan kemampuan kerja serta kemauan para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan, bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman para kader Kampung KB Gayub kelurahan Gunung Anyar dalam melakukan penginputan serta pelaporan data dan dokumentasi kegiatan Kampung KB melalui *website* Kampung KB belum cukup baik. Hal ini juga terjadi karena salah satu faktor alami yaitu usia. Pernyataan tersebut sesuai dengan pandangan menurut (Woyanti, 2014) bahwa faktor usia adalah salah satu yang berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja. Orang-orang yang masih dalam masa produktif biasanya memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja yang sudah berusia tua, sehingga kemampuan fisik mereka berkurang

dan terbatas. Karena berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan, bahwa sebagian besar kader Kampung KB Gayub kelurahan Gunung Anyar sudah berusia 40 tahun ke atas.

Hal tersebut menyebabkan pemahaman dan daya ingat terhadap penggunaan *website* Kampung KB masih belum optimal. Hal ini dibenarkan oleh pernyataan para kader, bahwa mereka merasa kebingungan dan merasa pusing, akibat penggunaan teknologi yang semakin canggih dan tidak mereka kuasai. Sehingga dibutuhkannya pelaksana program *website* Kampung KB yang memiliki usia lebih muda. Karena dibutuhkannya kemampuan dalam penggunaan teknologi informasi. Meskipun begitu, dalam realitanya para kader Kampung KB Gayub kelurahan Gunung Anyar sebenarnya masih memiliki semangat dalam kegiatan yang dilakukan. Hal ini terlihat dari kerja keras dan semangat saat para kader melakukan kegiatan Kampung KB. Hanya saja memang, dibutuhkan kembali tambahan kader yang memiliki usia lebih muda agar dapat dijadikan sebagai operator dalam penginputan laporan pada *website* Kampung KB.

Manfaat Kebijakan. Penerapan Pelaporan Digital Kampung KB melalui *website* Kampung KB pasti memiliki manfaat dalam penggunaannya. *website* Kampung KB digunakan sebagai tempat melakukan pelaporan dan penginputan data mengenai Kampung KB bagi masing-masing wilayah di Kota Surabaya termasuk pada kelurahan Gunung Anyar, hal ini akan memberikan dampak dan manfaat bagi pihak pemerintah yaitu mempermudah bagi sektor pemerintahan dalam upaya pengawasan serta mengevaluasi program dan kegiatan Kampung KB melalui suatu *website*. Selain itu, *website* Kampung KB juga memiliki dampak dan manfaat bagi para pembaca, yaitu dapat digunakan sebagai wadah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas dari berbagai daerah di Indonesia, mengenai perkembangan dari suatu Kampung KB di setiap wilayah tertentu. Sehingga

memberikan kemudahan bagi masyarakat umum pula, untuk dapat melihat dan menikmati informasi mengenai Kampung KB yang ada di daerah lain.

Hal ini sesuai dengan standar *operating procedures* atau SOP dalam pelaksanaan program Kampung KB. Adapun SOP penggunaan *website* Kampung KB sesuai dengan program Kampung KB adalah: Peningkatan cakupan dan akses pendidikan; Peningkatan cakupan layanan jaminan dan perlindungan sosial pada keluarga dan masyarakat miskin dan rentan; serta Pemberdayaan ekonomi keluarga dan penataan lingkungan keluarga, peningkatan akses air minum, dan sanitasi dasar.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan hasil penelitian dan diskusi yang telah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa Implementasi Pelaporan Digital Kampung KB melalui *website* Kampung KB Gayub pada Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya belum berjalan dengan baik, apabila dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan oleh Sujianto ada 4 indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan manfaat kebijakan. Dari keempat indikator tersebut, yang masih menjadi kendala adalah kurangnya komunikasi yang terjalin antara lembaga terkait sebagai pembuat kebijakan dengan para kader di lapangan sebagai pelaksana tentang pengoperasian *website* Kampung KB, serta masih kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh SDM dalam kemampuan penginputan dan pelaporan kegiatan pada *website* Kampung KB Gayub Kelurahan Gunung Anyar. Padahal berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, sebenarnya kelurahan Gunung Anyar telah banyak melaksanakan kegiatan yang termasuk dalam atribut Kampung KB, hanya saja karena kurangnya komunikasilah yang menyebabkan para pelaksana program Kampung KB tidak menyadari akan hal tersebut. Akibatnya, tidak adanya penginputan dan pelaporan yang

dilakukan di *website* Kampung KB Gayub Kelurahan Gunung Anyar.

Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah seharusnya dari pembuat kebijakan lebih intens lagi dalam pemberian sosialisasi dan edukasi terhadap para pelaksana di lapangan sehingga suatu kebijakan akan dapat terlaksana sesuai pada tujuan awal. Selain itu saran lain yang dapat diberikan adalah penambahan kader Kampung KB yang lebih memiliki kompetensi dalam menjalankan teknologi, sehingga dapat bertugas sebagai operator untuk melakukan proses penginputan serta pelaporan data dan dokumentasi kegiatan pada *website* Kampung KB Gayub Kelurahan Gunung Anyar. Karena dengan adanya *website* Kampung KB ini, dapat menghasilkan suatu kemanfaatan terhadap *sector* pemerintah ataupun dari pihak masyarakat. Yaitu mempermudah bagi sektor pemerintahan dalam proses kegiatan pengawasan serta pengevaluasian adanya kegiatan yang dilakukan dalam inovasi Kampung KB melalui suatu *website*. Selain itu bagi para pembaca dapat digunakan sebagai wadah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas dari berbagai daerah di Indonesia, mengenai perkembangan dari suatu Kampung KB di setiap wilayah tertentu. Sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat umum, untuk dapat melihat dan menikmati informasi mengenai Kampung KB yang ada di daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, D. d. (2000). Sistem Pengendalian Manajemen Edisi V. Jakarta: Erlangga.
- Abdullah. (2005). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada kabupaten dan Kota di daerah Istimewa Yogyakarta).
- BKKBN. (2023). Kampung Keluarga Berkualitas. <https://kampungkb.bkkbn.go.id/> [Diakses:12 Desember 2023].

- Fitria, R. N. (2020). Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Di Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya.
- Inpres No.3, Peraturan BPK. (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/222075/inpres-no-3-tahun-2022> [Diakses: 12 Desember 2023].
- Instruksi Presiden republik Indonesia-JDIH Sekretariat Kabinet https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176769/Instruksi_Presiden_Nomor_3_Tahun_2022.pdf [Diakses: 12 Desember 2023].
- Kusmaningrum. (2010). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- Leo, A. (2006). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Sujianto. (2008). Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktik. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Surabaya, D. (2023, Juni 26). Retrieved from [dp3appkb.surabaya.go.id:](https://dp3appkb.surabaya.go.id/) <https://dp3appkb.surabaya.go.id/wujudkan-keluarga-berkualitas-dp3appkb-gandeng-bkkbn-tingkatkan-kapasitas-petugas-di-lapangan/> [Diakses: 12 Desember 2023].
- Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI. Panduan KKL.
- Wahab, A. S. (2011). Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Woyanti, M. &. (2014). Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah, Jenis Kelamin, Usia dan Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja (Studi di Industri Kecil Tempe di Kota Semarang).